

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan ekonomi, meskipun masalah pembangunan ekonomi ini hanya bagian dari masalah pembangunan nasional, tetapi masalahnya sedemikian luasnya dengan berbagai aspek yang pelik.

Pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan suatu strategi pembangunan yang tepat dan cermat. Tepat artinya bahwa strategi pembangunan yang diselenggarakan dapat merespon kebutuhan dan permasalahan ekonomi daerah. Cermat artinya bahwa strategi pembangunan yang diselenggarakan secara jelas memperhitungkan setiap faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami peningkatan atau dikatakan berkembang jika tingkat kegitan ekonominya lebih

besar dari masa sebelumnya. Pertumbuhan ini ditunjukkan dengan naiknya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut.

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga dipengaruhi oleh aktivitas pendapatan dan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara mungkin dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi atau cepat, namun belum tentu menggambarkan suatu perbaikan bagi Negara tersebut. Hal ini dapat terjadi jika pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk atau pertumbuhan penduduk mempunyai nilai yang sama dengan pertumbuhan pendapatan nasional sehingga pendapatan perkapita tidak mengalami perubahan.

Terdapat tiga ciri pokok yang menandai perkembangan permasalahan kependudukan Indonesia dewasa ini yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan, penyebaran penduduk yang kurang seimbang serta kualitas kehidupan penduduk yang perlu ditingkatkan (Lincoln Arsyad, 1999 : 268).

Menurut Suryana (2000: 82), masing-masing masalah dalam kependudukan menimbulkan keadaan-keadaan yang mempersulit usaha-usaha Negara yang sedang berkembang untuk mempercepat proses pembangunan ekonominya yaitu memperlambat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional.

Penduduk mempunyai kontribusi penting dalam pertumbuhan nasional suatu Negara dalam rangka menciptakan modal manusia. Jika pertumbuhan penduduk tersebut disertai dengan kenaikan produktifitasnya yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun jumlah penduduk yang sangat tinggi dapat menjadi penghambat pembangunan ekonomi karena dalam perhitungan pendapatan nasional perkapita dihitung pendapatan nasional dibagi

dengan jumlah penduduk maka pendapatan perkapita menjadi semakin kecil.

Pertambahan jumlah penduduk tidak hanya disebabkan oleh pertambahan secara alami, tapi juga disebabkan oleh pertambahan migrasi. Migrasi merupakan satu dari tiga determinan demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Salah satu ciri demografi Indonesia adalah distribusi penduduk yang tidak merata dimana sebagian besar (59%) penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,9% dari total wilayah Indonesia sehingga pulau ini menjadi daerah yang terpadat penduduknya (Badan Pusat Statistik, SUPAS 1995).

Persentase penduduk yang tinggal di perkotaan (angka urbanisasi) akan terus meningkat. Pada tahun 1990 sekitar 30,9% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, meningkat menjadi 46% pada tahun 2005, dan diproyeksikan mencapai hampir 60% pada tahun 2020, (Mudrajad Kuncoro, 2003: 206).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Km² di Enam Kota Tahun 1990 dan 1995

Kota	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk Per Km ²	
	1990	1995		1990	1995
Medan	1 730 052	1 901 935	265,00	6 562	7 177
Jakarta	8 227 746	9 112 652	644,32	12 770	14 143
Bandung	2 058 122	2 356 120	168,06	12 246	14 020
Semarang	1 249 230	1 346 352	373,67	3 343	3 603
Surabaya	2 473 272	2 694 554	274,06	9 025	9 831
Ujung Pandang	944 372	1 086 121	175,77	5 373	6 179

Sumber: SP 90 dan SUPAS 95 dalam Profil Migran Masuk di Enam Kota Besar (Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang)

Data tersebut menunjukkan kepadatan penduduk di enam kota besar yang ada di Indonesia. Kota yang paling besar tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Jakarta sebagai ibu kota negara yaitu sebesar 12.770/km² pada tahun 1990 dan 14.143/km² pada tahun 1995. Kota yang menduduki peringkat

kedua adalah Kota Bandung sebagai ibu kota propinsi Jawa Barat yaitu sebesar 12.246/km² pada tahun 1990 dan 14.020/km² pada tahun 1995.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan tanpa diimbangi kesempatan kerja yang lebih banyak akan mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah dan meningkatnya pekerja di sektor informal, yang pada akhirnya berpeluang menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan tingkat sosial ekonomi, perumahan, dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya daerah kumuh (*slum area*), tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, kekurangan dan memburuknya fasilitas umum, sektor informal yang sulit diatur dan bermacam permasalahan lain yang dikaitkan dengan migrasi. Masalah-masalah tersebut sudah merupakan permasalahan yang tidak saja dialami oleh Indonesia tetapi juga oleh Negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Pendatang baru dari daerah pedesaan diduga mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pesatnya peningkatan penduduk dan masalah sosial di daerah perkotaan, sehingga timbul pandangan bahwa migrasi dari desa ke kota cenderung menghambat perkembangan pembangunan daerah perkotaan (**Badan Pusat Statistik, 1995: 2**).

Ketidakmerataan penduduk mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan yang selanjutnya mengakibatkan keinginan untuk pindah (migrasi) menjadi tinggi. Menurut **Tjiptoherijanto (1999)** dalam **Evi Susanti Tasri (2002)**, pola migrasi penduduk Indonesia belum mampu mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia secara merata di seluruh kawasan Indonesia, bahkan sebaliknya.

Migrasi atau mobilitas penduduk merupakan akibat ketidakmerataan pertumbuhan dan fasilitas sosial dan ekonomi antara daerah yang satu dengan

daerah yang lainnya. Penduduk dari daerah-daerah yang fasilitas sosial dan ekonominya kurang akan bergerak ke daerah-daerah yang fasilitas sosial dan ekonominya banyak. Sama halnya dengan mengalirnya penduduk dari pedesaan ke daerah kota karena adanya ketimpangan sosial (Djadja Saefullah dalam **Pikiran Rakyat** edisi Kamis 12 Desember 2002).

Tabel 1.2
Distribusi Migran Masuk Dari Daerah Pedesaan Menurut Tempat Tinggal 5 Tahun Lalu di Enam Kota

Kota Tempat Tinggal Sekarang	Tempat Tinggal 5 tahun yang Lalu				Jumlah
	Dalam Kota	Luar Kota		Tidak Tahu	
		Dalam Propinsi	Luar Propinsi		
Medan (%)	3 421 (4,21)	66 094 (81,9)	10 885 (13,5)	311 (0,4)	80 711 (100,0)
Jakarta (%)	- -	-	357 934 (100,0)	0 (0,0)	359 445 (100,0)
Bandung (%)	0 (0,0)	88 780 (61,1)	56 580 (38,9)	0 (0,0)	145 360 (100,0)
Semarang (%)	5 404 (9,3)	38 866 (66,6)	14 095 (24,1)	0 (0,0)	58 365 (100,0)
Surabaya (%)	242 (0,1)	177 902 (87,9)	24 300 (12,0)	0 (0,0)	202 444 (100,0)
Ujung Pandang (%)	122 (0,2)	57 488 (72,7)	21 459 (27,1)	0 (0,0)	79 069 (100,0)

Sumber: SP 90 dan SUPAS 95 dalam Profil Migran Masuk di Enam Kota Besar (Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa migran masuk dari daerah pedesaan sebagian besar berasal dari luar kota namun masih dalam propinsi yang sama, kecuali untuk Kota Jakarta. Banyaknya migran dari luar kota dalam satu propinsi ini menunjukkan bahwa migran yang berasal dari desa cenderung memilih ibu kota propinsi yang merupakan kota besar terdekat sebagai kota tujuan pindah.

Tabel 1.3
Distribusi Persentase Migran Masuk dari Daerah Pedesaan Menurut
Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan

Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	Kota					
	Medan	Jakarta	Bandung	Semarang	Surabaya	Ujung Pandang
Tidak/Belum Tamat SD/ Tamat SD	29,4	46,2	48,6	55,6	50,2	20,6
Tamat SLTP	27,7	19,0	15,1	12,1	19,3	24,6
Tamat SLTA	36,7	29,0	30,7	30,3	23,3	50,9
Akademi/Diploma III + Univ./Diploma IV	6,2	5,8	5,6	2,0	7,2	4,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: SP 90 dan SUPAS 95 dalam Profil Migran Masuk di Enam Kota Besar (Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang)

Hal yang sudah umum adalah bahwa migran yang datang ke kota besar memiliki kondisi sosial ekonomi yang minim, seperti latar belakang pendidikan umumnya masih rendah. Padahal untuk dapat bersaing hidup di kota besar, faktor tingkat pendidikan sangatlah menentukan keberhasilan hidup. Tabel 1.3 memperjelas hal tersebut, tampak bahwa masih banyak migran yang berpendidikan rendah. Khusus untuk Kota Bandung, persentase migran didominasi oleh yang pendidikannya hanya tidak/belum tamat SD/tamat SD yaitu sebesar 48,6%, dan hanya 5,6% saja yang berpendidikan tinggi.

Indonesia sebagai Negara berkembang dimana tingkat migrasi berlanjut terus melebihi tingkat penciptaan lapangan pekerjaan di daerah perkotaan dan jauh melebihi kapasitas pekerjaan-pekerjaan di sektor-sektor yang ada di perkotaan seperti sektor perindustrian untuk menyerap tenaga kerja secara efektif. Dampak migrasi terhadap proses pembangunan lebih banyak mengisi daripada mengurangi pengangguran di daerah perkotaan. Sebenarnya, pentingnya arti fenomena migrasi tidak hanya dalam proses itu sendiri atau

dalam dampaknya terhadap alokasi sumber-sumber daya manusia, namun juga dalam konteks implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Tabel 1.4
Perkembangan Migrasi Masuk Ke Kota Bandung
Periode 1997-2007

Tahun	Migrasi Masuk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
1997	2.104	-
1998	2.338	11,12
1999	2.536	8,46
2000	2.872	13,25
2001	6.440	124,23
2002	6.436	-0,06
2003	7.037	9,33
2004	7.392	5,04
2005	13.433	81,72
2006	13.707	2,04
2007	14.347	4,67
Jumlah	65.209	287,72
Rata-rata	5.928	28,77

Sumber : Dinas Kependudukan Kota Bandung dan Badan Pusat Statistik(BPS), beberapa edisi, data diolah

Data tersebut menunjukkan perkembangan jumlah migrasi masuk yang terjadi di Kota Bandung dari tahun 1997 sampai tahun 2007. Berdasarkan data pada tabel 1.3, selama kurun waktu 1997-2007 migrasi masuk ke Kota Bandung memiliki rata-rata 5.928 jiwa per tahun. Migrasi masuk tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 14.347 jiwa, sedangkan migrasi masuk terkecil terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar 2.104. Pada tahun 2002 migrasi masuk mengalami penurunan sebesar 0,06% yaitu dari 6.440 jiwa pada tahun 2001 menjadi 6.436 pada tahun 2002. Penurunan ini sangat kecil sehingga secara keseluruhan

terlihat kecenderungan peningkatan arus migrasi masuk ke Kota Bandung dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,77% setiap tahunnya.

Banyaknya migran yang masuk ke Kota Bandung menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah, apalagi jika migran yang masuk memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah yang hanya akan menjadi beban bagi pemerintah daerah setempat. Dengan bertambahnya penduduk di Kota Bandung, secara langsung maupun tidak langsung Pemerintah Daerah harus menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Fasilitas itu seperti perumahan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sarana sosial, kesehatan dan sebagainya.

Hal tersebut sepenuhnya dapat tergantung pada kemampuan sistem perekonomian dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja. Demikian halnya pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peningkatan dan penurunan jumlah migrasi ke wilayah Kota Bandung tidak terlepas dari faktor-faktor ekonomi yang ada di Kota Bandung yang menarik penduduk luar daerah untuk bermigrasi ke Kota Bandung.

Kota Bandung merupakan ibu kota propinsi Jawa Barat dan Jawa Barat sendiri merupakan salah satu propinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Rata-rata kontribusi perekonomian Jawa Barat dari tahun 1993 hingga 1998 adalah sebesar 16,7%. Beberapa sektor ekonomi di Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap industri nasional sebesar 23%, sektor listrik, gas dan air, bangunan rata-rata 35,2% dan sektor lain relatif memberikan kontribusi cukup besar atau rata-rata di atas 10% . Selain itu Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Jawa barat pada

khususnya merupakan tujuan investasi swasta, baik investasi domestik maupun investasi asing (**Badan Pusat Statistik, Jawa Barat Dalam Angka 1999**).

Menurut **John Maynard Keynes** yang dikutip oleh **T Gilarso (1991:27)** Investasi memainkan peranan penting di dalam masyarakat, terlebih lebih dalam masyarakat yang sedang membangun. Investasi bagaikan motor yang menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat karena investasi memperbesar kapasitas produksi, menciptakan kesempatan kerja baru, meningkatkan PDB dan meningkatkan pendapatan.

Menurut **Rondineli dan Ruddle (1978)** dalam **Prijono Tjiptoherijanto (2000)** pada negara berkembang, konsentrasi investasi dan sumber daya pada umumnya berada di daerah perkotaan.

Tanah Priangan bukan hanya terkenal karena keindahannya sehingga pemerintah kolonial Belanda pernah merencanakan Kota Bandung sebagai Ibu Kota pengganti Batavia. Tanah Priangan yang dikenal dengan Cekungan Bandung terdiri dari wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dengan luas seluruhnya 326.000 hektar. Pusat Cekungan Bandung adalah Kota Bandung yang sekaligus menjadi Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Sebagai kota terbesar di Jawa Barat, Kota Bandung dengan beberapa kelebihan sarana dan prasarana tidak mengherankan memiliki daya tarik yang sangat kuat. Kota Bandung menampung berbagai aktivitas, antara lain pusat pemerintahan Jawa Barat, pusat perdagangan lokal dan regional, pusat pendidikan dan pengetahuan, kota pariwisata, kebudayaan dan konferensi, dan pusat industri.

Pemberian fungsi-fungsi itu memang menjadi daya tarik investor untuk melakukan investasi. Dengan demikian, pada gilirannya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang selama ini dijadikan salah satu indikator kemajuan.

Harapan itu memang tidak meleset. Selama periode 1975-1985 misalnya, laju pertumbuhan ekonomi nyata Kota Bandung mencapai rata-rata 9% per tahun berdasarkan harga konstan tahun 1973. Pada periode 1985-1990 meningkat tajam menjadi 12,02%. Jauh di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang sebesar 7,6%. Namun, meningkatnya investasi tersebut pada gilirannya mendorong makin meningkatnya arus migrasi. Padahal, Kota Bandung bukanlah Surabaya atau apalagi DKI Jakarta. Wilayah fisik Kota Bandung memiliki beberapa keterbatasan walaupun sudah lima kali mengalami perluasan wilayah. Kepadatan rata-rata penduduk sekitar 110 jiwa per hektar, jauh di atas standar yang ditetapkan PBB yaitu 60 jiwa per hektar. Kota Bandung khususnya dan Cekungan Bandung pada umumnya, menghadapi masalah serius dalam kependudukan dengan segala implikasinya, merupakan masalah serius sekarang ini, apalagi untuk masa yang akan datang. Dan, penduduk wilayah ini akan terus berkembang pesat (Her Suganda dalam Kompas edisi Senin, 06 Desember 2004).

Langkah sederhana yang penting dalam menggaris bawahi fenomena migrasi ini adalah menyadari bahwa setiap kebijaksanaan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan masyarakat yang nyata baik di desa maupun kota secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi proses migrasi. Proses itu sendiri pada gilirannya akan cenderung mengubah pola kegiatan ekonomi, geografis dan sektoral, pemerataan pendapatan, bahkan pertumbuhan populasi. Hal ini terjadi karena semua kebijaksanaan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan baik di pedesaan maupun perkotaan, semuanya mempunyai pengaruh atau dampak

yang lebih langsung dan lebih cepat, misalnya kebijaksanaan di bidang pengupahan.

Analisis dan perkiraan besaran dan arus migrasi merupakan hal yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya, terutama di era otonomi daerah ini. Apalagi jika analisis mobilitas tersebut dilakukan pada suatu wilayah administrasi yang lebih rendah daripada tingkat propinsi. Karena justru tingkat mobilitas penduduk baik permanen maupun nonpermanen akan tampak lebih nyata terlihat pada satuan unit administrasi yang lebih kecil seperti kabupaten, kecamatan dan desa atau kelurahan (www.bps.go.id).

Menurut Todaro (2000, 333), saat ini mulai terbina suatu kesepakatan di antara para ekonom dan ilmuwan sosial non-ekonom bahwa faktor yang paling mampu untuk menjelaskan fenomena migrasi dari desa ke kota adalah faktor-faktor ekonomi.

Dari permasalahan di atas diperkirakan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi jumlah migrasi masuk ke Kota Bandung yaitu investasi, kesempatan kerja dan upah. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Migrasi Masuk ke Kota Bandung Periode Tahun 1997-2007”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada pokok permasalahan yaitu:

1. Faktor-faktor ekonomi apa saja yang mempengaruhi migrasi masuk ke Kota Bandung periode 1997-2007?

2. Seberapa jauh faktor-faktor ekonomi tersebut mempengaruhi migrasi masuk ke Kota Bandung periode 1997-2007?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor ekonomi apa saja yang mempengaruhi migrasi masuk ke Kota Bandung periode 1997-2007.
2. Mengetahui seberapa jauh faktor-faktor ekonomi tersebut mempengaruhi migrasi masuk ke Kota Bandung periode 1997-2007.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Ilmiah

Kegunaan ilmiah dari penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi makro.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian adalah sebagai umpan balik tentang apa dan bagaimana pengaruh faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi migrasi masuk ke Kota Bandung periode tahun 1997-2007.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi menurut **Simon Kuznets** adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut **Simon Kuznets** dalam **Jhingan (2004 : 57)** pertumbuhan ekonomi ditandai oleh tiga ciri pokok, yaitu:

1. Laju pertumbuhan pendapatan perkapita dalam arti nyata (riil)
2. Distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkah.
3. Pola persebaran penduduk.

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara dapat membawa dampak positif maupun negatif, contoh yang positif adalah adanya dampak dari pertumbuhan ekonomi yaitu semakin makmur dan sejahteranya penduduk dengan kenaikan pendapatan perkapita. Namun dampak yang negatif juga dirasakan contohnya adalah peningkatan populasi, lahan semakin sempit untuk tempat tinggal akibat meluasnya area yang digunakan untuk lapangan usaha, baik industri, perdagangan maupun jasa. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi (**Todaro, 2000 : 125**).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh propinsi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk. Pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi harus dinikmati penduduk maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dinikmati penduduk jika

pertumbuhan penduduk jauh lebih tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui indikator perkembangan PDB untuk nasional dan PDRB untuk daerah dari tahun ketahun.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik tentang pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi para ahli ekonomi klasik menerangkan tentang perkembangan penduduk akan mempengaruhi corak proses pertumbuhan, menurut **Todaro (2000:124)** ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Jumlah penduduk
2. Jumlah stok barang modal
3. Luas tanah dan kekayaan alam
4. Tingkat teknologi yang digunakan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa jumlah penduduk di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penduduk di satu sisi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, namun jika jumlahnya terlalu besar hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan menciptakan permasalahan ekonomi yang pelik.

Pertumbuhan ekonomi yang baik akan memiliki pengaruh yang baik terhadap penyerapan tenaga kerja dan merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan nasional. Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk banyak, begitu juga dalam hal tenaga kerjanya. Oleh karena itu apabila tenaga kerja dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan maka hal ini akan menjadi sumbangan yang besar dalam pembangunan ekonomi. Namun jika kualitas Sumber Daya Manusianya rendah, hal ini akan menghambat proses pembangunan.

Ditinjau dari aspek ekonomi, penduduk dikategorikan sebagai Sumber Daya Manusia yang terdiri dari tenaga kerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sedangkan perluasan kesempatan kerja sebagai segi lain dari masalah kependudukan merupakan aspek ekonomi yang semakin penting untuk dipermasalahkan sehingga tidak menjadi halangan besar bagi terlaksananya pembangunan ekonomi. Di banyak Negara berkembang, jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama di sebagian Negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan agar jumlah tenaga kerja diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan (Suseno Triyanto 2002 : 36).

Angkatan kerja di Negara-negara dunia ketiga meningkat terus tak hanya disebabkan oleh penambahan penduduk secara alamiah, tetapi terutama disebabkan karena migrasi dari desa atau kota-kota kecil ke kota-kota besar. Pada awalnya migrasi dari desa ke kota dipandang sebagai hal yang menguntungkan dalam kajian pembangunan ekonomi. Migrasi internal dianggap sebagai suatu proses yang alamiah dimana surplus tenaga kerja secara perlahan ditarik dari sektor pedesaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi pertumbuhan industri di perkotaan (Todaro, 2000: 330).

Migrasi merupakan salah satu dari ketiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, sedangkan faktor lain adalah kelahiran dan kematian. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya densitas (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang

untuk melakukan migrasi, adanya desentralisasi dalam pembangunan, di pihak lain komunikasi termasuk transportasi semakin lancar (Rozy Munir, 1981 : 115).

Sedangkan pengertian migrasi itu sendiri menurut Rozy Munir adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/Negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu Negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain (Rozy Munir, 1981 : 116).

Strategi pembangunan ortodoks yang dijalankan pada beberapa dekade yang lalu yang mengutamakan modernisasi industri, kecanggihan teknologi dan pertumbuhan metropolis, jelas telah menciptakan ketimpangan geografis dalam penyebaran kesempatan atau peluang-peluang ekonomi, dan sekaligus menjadi penyebab utama perpindahan secara besar-besaran penduduk desa ke kota-kota secara terus menerus (Todaro, 2000 : 321).

Hal ini dipertegas lagi oleh Tommy Firman (1994) dalam Beny Darmawan Chotib (2007) bahwa migrasi sebenarnya merupakan suatu reaksi atas kesempatan ekonomi pada suatu wilayah. Pola migrasi di negara-negara yang telah berkembang biasanya sangat rumit (kompleks) menggambarkan kesempatan ekonomi yang lebih seimbang dan saling ketergantungan (interdependensi) antar wilayah di dalamnya. Sebaliknya di negara-negara berkembang biasanya pola migrasi menunjukkan suatu pengutuban (polarisasi), yaitu pemusatan arus migrasi ke daerah-daerah tertentu saja, khususnya kota-kota besar.

Saat ini migrasi dianggap sebagai penghambat pembangunan seperti yang diungkapkan oleh **Tirtosudarmo (1999)** dalam **Evi Susanti (2002)**, migrasi penduduk menempati posisi yang sangat krusial bagi Indonesia. Hal ini karena kombinasi sifat multi etnik penduduk dan kontur geografis dari Indonesia yang berupa kepulauan, dimana hal ini tidak ditemukan di Negara-negara lain. Selama dua dekade terakhir di Indonesia terjadi peningkatan mobilitas penduduk. Selain itu **Todaro (2000)** mengemukakan adanya *paradox of migration* yaitu migrasi akan memperburuk kondisi pengangguran di perkotaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan struktur daerah desa dan kota.

Arus perpindahan tenaga kerja dari daerah pedesaan ke kota-kota telah jauh melampaui tingkat penciptaan atau penambahan lapangan kerja sehingga migrasi yang saat ini berlangsung sedemikian deras telah melampaui daya serap sektor-sektor industri maupun jasa-jasa pelayanan sosial yang ada di daerah-daerah perkotaan. Sekarang migrasi harus dilihat sebagai faktor negatif yang menyebabkan surplus tenaga kerja perkotaan secara berlebihan serta sebagai suatu kekuatan yang secara terus menerus memperburuk masalah-masalah pengangguran di berbagai daerah perkotaan yang pada awalnya bersumber dari ketidakseimbangan struktural dan ekonomi antara daerah-daerah perkotaan dan pedesaan (**Todaro, 2000 : 330**).

Menurut **Rozy Munir (1981)**, pada dasarnya ada dua pengelompokan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik.

Faktor-faktor Pendorong terdiri dari :

1. Makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambnag, kayu atau bahan dari pertanian.
2. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya pedesaan) akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin (*capital intensive*)
3. Adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal.
4. Tidak cocok lagi dengan adat/budaya/kepercayaan di tempat asal.
5. Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi.
6. Bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

Faktor-faktor penarik terdiri dari:

1. Adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok.
2. Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
3. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
4. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya.
5. Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung.
6. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil.

Tujuan dan motif utama melakukan migrasi adalah untuk memperbaiki status dan keadaan ekonomi melalui pekerjaan dan pendidikan yang diduga bisa

diperoleh di daerah lain. Banyak studi yang dilakukan oleh para ahli menjelaskan bahwa sebagian besar orang melakukan migrasi karena keadaan ekonomi (Todaro, 2000 : 174).

Dalam teori Mobilitas Klasik atau disebut juga dengan istilah *The laws of migration* yang merupakan tujuh teori dasar migrasi yang dikembangkan oleh E.G Ravenstein pada tahun 1885 dalam Rozy Munir (1981 : 122), dikemukakan bahwa ketujuh teori migrasi yang merupakan penggeneralisasian dari migrasi ini adalah:

1. Migrasi Jarak

- Banyak migran pada jarak yang dekat
- Migran jarak jauh lebih tertuju ke pusat-pusat perdagangan dan industri yang penting.

2. Migrasi Bertahap

- Adanya arus migrasi yang terarah
- Adanya migrasi dari desa-kota kecil-kota besar

3. Arus dan Arus Balik

Setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik penggantinya.

4. Perbedaan antara desa dan kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi. Di desa lebih besar daripada di kota.

5. Wanita melakukan migrasi pada jarak yang dekat dibandingkan dengan pria

6. Teknologi dan migrasi. Teknologi menyebabkan migrasi meningkat

7. Motif ekonomi merupakan dorongan utama orang melakukan migrasi

Faktor pendorong dan penarik terjadinya perpindahan penduduk ke wilayah lain, biasanya sangat kondisional dan kasuistis. Perbedaan karakteristik wilayah/negara menunjukkan hubungan yang positif atas terjadinya perpindahan

penduduk atau migrasi. Ketidakseimbangan nilai sosial-budaya, ketidakseimbangan faktor lingkungan, terganggunya keamanan dan faktor ekonomi. Semakin maju suatu wilayah, akan semakin menarik bagi para pendatang yang memberi kontribusi positif bagi peningkatan aksesibilitas sosial ekonomi, sebaliknya, semakin tertinggal suatu daerah dalam aspek ekonomi, dapat dijadikan salah satu pendorong bagi penduduk untuk pindah ke daerah lain, utamanya pada kelompok usia tertentu guna mencari peluang kerja (**Badan Pusat Statistik, Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jawa Barat**).

Selain itu, menurut Hugo (1987) terdapat hubungan dua arah antara mobilitas penduduk dan proses pembangunan sosial ekonomi. Di satu sisi, migrasi akan mengundang ketimpangan-ketimpangan pembangunan. Di sisi lain, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan mengundang kehadiran para migran (**Badan Pusat Statistik, Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jawa Barat**).

Teori *Neoclasical Economics* lebih memberi perhatian pada perbedaan upah dan kondisi kerja antar daerah atau antar negara serta biaya dalam keputusan seseorang melakukan migrasi. Menurut aliran ini perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang maksimum (**PrijonoTjiptoherijanto, 2000: 2**).

Perspektif neo-klasik memandang perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain sebagai respon dari ketidakseimbangan distribusi modal dan Sumber Daya Manusia. Fenomena ini kemudian mempengaruhi arus migrasi. Arah migrasi akan datang dari wilayah yang kekurangan modal/investasi

ke wilayah dimana investasi banyak tercurah (**Badan Pusat Statistik, Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jawa Barat**).

Selain itu, menurut perspektif *historical structural* yang berawal dari *Karl Marx's Historical Materialism Concept*, memandang bahwa ketimpangan-ketimpangan wilayah adalah akibat dari tekanan struktural. Terjadinya migrasi adalah akibat dari ketimpangan yang diakibatkan oleh kapitalisme model pembangunan yang diadopsi dan ketidakseimbangan dalam penguasaan dan pengusahaan Sumber Daya Alam dan teknologi. Migrasi terjadi karena sekelompok masyarakat terpinggirkan dan tidak mendapat apa-apa dari proses pembangunan yang dilaksanakan (**Badan Pusat Statistik, Analisis Volume Kecenderungan dan Karakteristik Migrasi Masuk Ke Jawa Barat**).

Mengacu pada berbagai pendapat tersebut, pembangunan ekonomi memang akan mendorong terjadinya mobilitas dan perpindahan penduduk. Penduduk akan pindah ke tempat yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

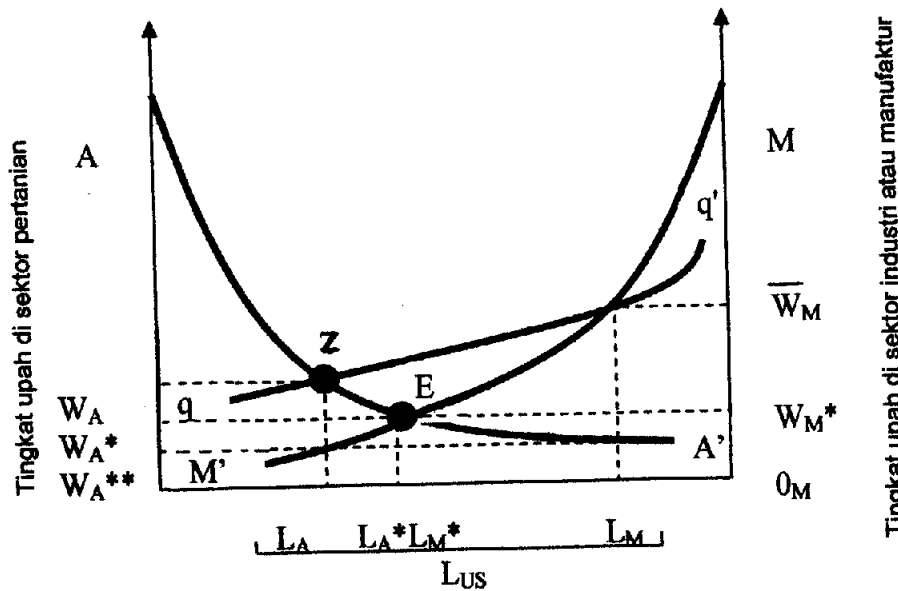
Migrasi yang terjadi di Indonesia terjadi setelah kemerdekaan hingga saat ini dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pola-pola migrasi yang terjadi sebelumnya, dicirikan dengan pengiriman tenaga kerja buruh kasar dan tenaga kerja sektor perkebunan dan kehutanan, konstruksi dan sektor jasa dengan status rendah seperti pembantu rumah tangga. Tenaga kerja migran juga sangat rentan terhadap eksploitasi karena ketidaktahuannya tentang hak dan kewajibannya. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah di masa depan untuk memanfaatkan pasar tenaga kerja yang terbuka dengan memperhatikan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. Pelaku migrasi pada umumnya berasal dari daerah miskin dalam pengertian mereka kekurangan tanah pertanian dan sumber daya lainnya sehingga mengakibatkan

pendapatan mereka rendah. Mereka bermigrasi dengan harapan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

Model migrasi Todaro dalam (Todaro, 2000 : 340) bertolak dari asumsi bahwa migrasi dari desa ke kota merupakan suatu fenomena ekonomi, dengan 4 pemikiran dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Migrasi desa-kota dirangsang oleh berbagai pertimbangan ekonomi yang rasional dan langsung berkaitan dengan keuntungan atau manfaat dan biaya-biaya relatif migrasi itu sendiri (dalam satuan moneter ataupun kepuasan psikologis).
2. Keputusan untuk bermigrasi tergantung pada selisih antara tingkat pendapatan yang diharapkan di kota dan tingkat pendapatan aktual di pedesaan (pendapatan yang diharapkan adalah sejumlah pendapatan yang secara rasional bisa diharapkan akan tercapai di masa-masa mendatang). Besar kecilnya selisih pendapatan itu sendiri ditentukan oleh dua variabel pokok, yaitu selisih besaran upah aktual di kota dan di desa, serta besar atau kecilnya mendapatkan pekerjaan di perkotaan yang menawarkan tingkat pendapatan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Kemungkinan mendapatkan pekerjaan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan.
4. Migrasi desa-kota bisa saja terus berlangsung meskipun pengangguran di perkotaan sudah cukup tinggi (asalkan masih di bawah selisih pendapatan tersebut). Kenyataan ini memiliki landasan yang rasional, yakni para migran pergi ke kota untuk meraih tingkat upah yang lebih tinggi dan nyata (memang tersedia). Dengan demikian, lonjakan pengangguran di perkotaan merupakan akibat yang tidak terhindarkan dari adanya ketidakseimbangan kesempatan

ekonomi yang sangat parah antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan (antara lain berupa kesenjangan tingkat upah tadi), dan ketimpangan-ketimpangan seperti itu amat mudah ditemui di kebanyakan Negara Dunia Ketiga.



Gambar 1.1

Model Migrasi Todaro

(Sumber: M.P Todaro.2000.Ekonomi Pembangunan Dunia Ketiga. Erlangga : Jakarta)

Proses pencapaian titik ekuilibrium pengangguran (yang akan tercapai setelah tingkat pendapatan yang diharapkan di kota sama dengan tingkat pendapatan aktual di desa) yang akan menghentikan arus migrasi (bukannya keseimbangan tingkat upah di desa dan kota seperti dikemukakan model pasar tenaga kerja neoklasik tradisional) tersebut bisa pula dijelaskan secara diagramatis. Diagramnya sudah tersaji pada diagram tersebut. Perekonomian diasumsikan dalam perekonomian (atau Negara) hanya ada dua sektor, yakni sektor pertanian di pedesaan dan sektor industri di perkotaan. Tingkat permintaan tenaga kerja (kurva produk marginal tenaga kerja) di dalam sektor pertanian dilambangkan oleh garis melengkung ke bawah, AA' . Adapun tingkat

pemintaan tenaga kerja di sektor industri ditunjukkan oleh garis lengkung (dari kanan ke kiri) MM' . Total angkatan kerja yang tersedia disimbolkan oleh $O_A O_M$. Dalam perekonomian pasar neoklasik (upah ditentukan oleh mekanisme pasar dan segenap tenaga kerja akan dapat terserap), tingkat upah ekuilibrium akan tercipta bila $W_A^* = W_M^*$, dengan pembagian tenaga kerja sebanyak $O_A L_A^*$ untuk sektor pertanian, dan $O_M L_M^*$ untuk sektor industri. Sesuai dengan asumsi *full employment*, segenap tenaga kerja yang tersedia akan terserap habis oleh kedua sektor ekonomi tersebut.

Hal yang akan terjadi jika tingkat upah ditentukan oleh pemerintah (bukannya oleh mekanisme pasar lagi, sehingga garis lengkungnya tidak lagi fleksibel), sebagaimana telah diasumsikan oleh model Todaro, katakanlah sebesar \bar{W}_M , yang terletak di atas W_A^* , jika kita juga berasumsi bahwa dalam perekonomian tersebut tidak ada pengangguran, maka tenaga kerja sebanyak $O_M L_M$ akan bekerja di sektor industri manufaktur di perkotaan, sedangkan sisanya sebanyak $O_A L_M$ akan berkecimpung dalam sector pertanian di pedesaan dengan tingkat upah sebanyak $O_A W^{**}_A$ (ini lebih kecil daripada tingkat upah pasar yang mencapai $O_A W^*_A$). Maka tercipta suatu kesenjangan atau selisih tingkat upah antara desa dan kota sebanyak $\bar{W}_M - W^{**}_A$ (\bar{W}_M adalah tingkat upah yang ditentukan oleh pihak pemerintah). Jika para pekerja di pedesaan bebas melakukan migrasi, maka meskipun di desa tersedia sebanyak lapangan kerja sebanyak $O_M L_M$ mereka akan pergi ke kota-kota guna memburu tingkat upah yang lebih tinggi. Jika peluang (probabilitas) bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dinyatakan sebagai rasio antara penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur, atau L_M , dan total angkatan kerja desa atau L_{US} , maka nilai peluang itu bisa kita hitung berdasarkan rumus berikut ini :

$$W_A = \frac{L_M}{L_{US}} (\overline{W_M})$$

Nilai peluang perolehan pekerjaan itulah yang selanjutnya akan menyamakan tingkat upah di pedesaan, yakni W_A dengan tingkat pendapatan yang diharapkan di perkotaan sebesar : $(L_M/L_{US(M)})$. Adanya selisih tingkat upah desa-kota tersebut kemudian mendorong terjadinya arus migrasi dari desa ke kota. Tempat kedudukan (lokus) titik-titiknya diperlihatkan sebagai kurva qq' dalam tabel tersebut. Titik ekuilibrium pengangguran yang baru kini berada di titik Z , dimana selisih pendapatan aktual antara desa dan kota sama dengan $\overline{W_M} - W_A$. Jumlah tenaga kerja yang masih ada di sector pertanian adalah $O_A L_A$, sedangkan tenaga kerja sebanyak $O_M L_M$ ada di sector industri manufaktur dengan tingkat upah W_M . Sisanya yakni $L_{US} = O_M L_A - O_M L_M$, akan menganggur atau memasuki kegiatan sector informal yang berpendapatan rendah. Ini menjelaskan adanya pengangguran di daerah perkotaan dan logika atau rasionalitas ekonomi atas terus berlangsungnya migrasi dari desa ke kota, meskipun angka pengangguran di perkotaan cukup tinggi.

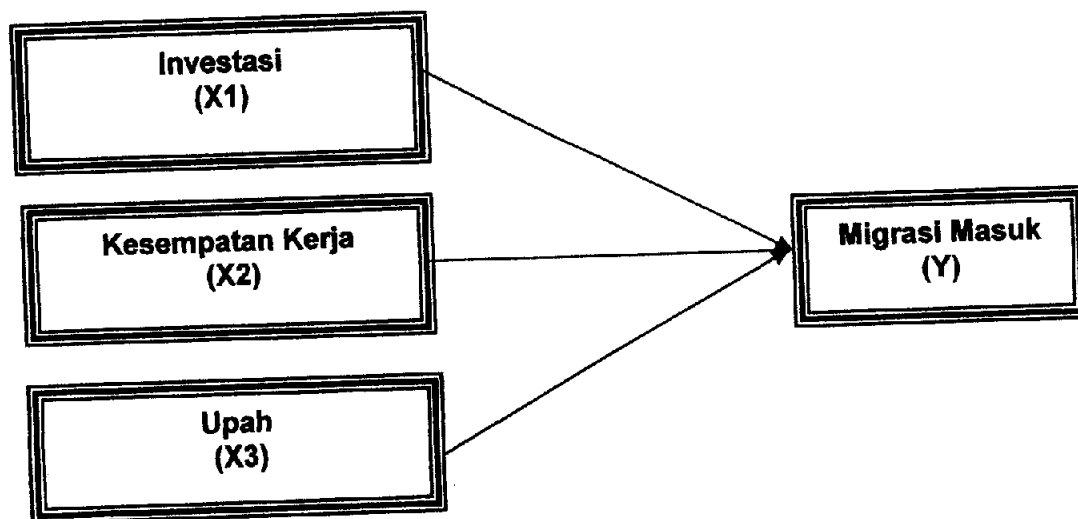
Adapun implikasi kebijakan mengenai migrasi yang dikemukakan oleh Todaro (Todaro 2000 ; 341) yang sangat penting bagi negara-negara berkembang adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa harus terus dikurangi.
2. Pemecahan masalah pengangguran tidak cukup hanya dengan penciptaan lapangan kerja di kota.
3. Pengembangan pendidikan yang berlebihan mengakibatkan migrasi dan pengangguran.
4. Pemberian subsidi upah dan penentuan harga faktor produksi tradisional (tenaga kerja) justru menurunkan produktivitas.

5. Program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu.

Dengan demikian, pada akhirnya kita harus mengakui bahwa migrasi yang jauh melampaui kesempatan kerja yang ada merupakan gejala dan salah satu penyebab utama keterbelakangan Dunia Ketiga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap penyebab, faktor penentu dan akibat-akibat dari migrasi internal desa-kota merupakan bekal pokok bagi kita untuk memahami karakteristik dan hakikat proses pembangunan, serta untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang sekiranya paling tepat untuk dapat mempengaruhi proses tersebut dengan cara yang bisa diterima secara sosial atau tidak menimbulkan dampak negatif secara sosial, (Todaro, 2000: 331).

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini terdapat dua variable yang diteliti yaitu variable dependen dan independent. Variabel dependen dalam makalah ini adalah migrasi masuk di Kota Bandung, sedangkan variable independen terdiri dari investasi di Kota Bandung, kesempatan kerja di Kota Bandung dan upah di Kota Bandung. Hubungan variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- X1 = Investasi di Kota Bandung
X2 = Kesempatan Kerja di Kota Bandung
X3 = Upah di Kota Bandung
Y = Migrasi Masuk di Kota Bandung

1.5 Hipotesis

Menurut Sugiono (2002 : 5) hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui fakta-fakta yang diperoleh melalui penelitian. Berdasarkan pada pendapat diatas, maka hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1.5.1 Hipotesis Mayor

Investasi, kesempatan kerja dan upah di Kota Bandung baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif terhadap migrasi masuk ke Kota Bandung periode 1997-2007.

1.5.2 Hipotesis Minor

1. Investasi berpengaruh positif terhadap jumlah migrasi masuk ke Kota Bandung periode 1997-2007.
2. Kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap jumlah migrasi masuk ke Kota Bandung periode 1997-2007.
3. Upah berpengaruh positif terhadap jumlah migrasi masuk ke Kota Bandung periode 1997-2007.

